



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA

JL. PEMUDA NO. 55A MOJOSARI, MOJOKERTO 61382 JAWA TIMUR
TELP. (0321) 592192 FAX. (0321) 593581

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR 188.45/14 /KEP/416-107/2022

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara berkesinambungan dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Tahun Lalu
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V : Penutup
- LAMPIRAN
- KETIGA** : Uraian Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal Agustus 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



BAMBANG PURWANTO



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO



**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan nantinya akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dimana terdapat (lima) program yang terdiri dari 3 (Tiga Program Prioritas) dan 2 (dua) program pendukung.

Harapan kami semoga Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2023.

Mojokerto, Mei 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



BAMBANG PURWANTO, SH., MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19690521 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
..... 7

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD..... 7

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 17

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH 18

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD 19

2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 34

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 34

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN..... 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 49

BAB V PENUTUP..... 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 3 yaitu *“Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah”*, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja OPD (Ranwal Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Ranwal Renja OPD ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan Rencana Kerja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto membuat Ranwal Renja yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur. Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, maka dalam penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat sebagai bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Selain itu

Rancangan Akhir Renja ini menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalm Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
 28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto:

a. Maksud :

1. menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk penyusunan program kegiatan,
2. menentukan lokasi kegiatan dan menyusun indikator kinerja kegiatan
3. serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar pembangunan di bidang ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Tujuan :

Tujuan disusunnya Rencana kerja adalah sebagai perwujudan dokumen perumusan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan pada tahun N+1 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Ranwal Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara RENJA PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA PD, RENJA K/L dan RENJA PROVINSI, Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada Renja tahun lalu dan pencapaian target Renstra OPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen Renstra OPD. Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 pada umumnya dapat tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dan disajikan pada tabel pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.1

RINCIAN CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			99,10%	72,08%
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		100%	98,75%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	98,75%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,68%
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100%	69,67%
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	100%	69,61%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100%	94,79%
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	90,9%	90,92%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	99,77%
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	90,9%	96,40%
			Penyediaan Bahan / Material	100%	99,99%

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	100%	94,09%
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	88,73%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	79,48%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	98,51%
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	88,73%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	96,83%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	100%	99,79%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100%	100%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			79,44%	62,86%
		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI		75,75%	59,35%
			Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	75,75%	59,35%
		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA		100%	73,06%
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	73,06%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			105,2%	64,30%
		PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	67,42%
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	100%	80,26%
			Pelayanan Antar Kerja	100%	45,81%
			Perluasan Kesempatan Kerja	100%	84,80%

		PENGLOLAAN INFORMASI PASAR KERJA		0%	0%
			Job Fair/ Bursa Kerja	0%	0%
		PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	99,64%
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,64%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			104,5%	84,20%
				100%	
		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		87,22%	84,20%
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72,35%	97,98%
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70%	81,33%
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	50%	67,53%
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100%	75,81%

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan, untuk pencapaian kinerja sebesar 99,10%, sementara persentase realisasi anggaran sebesar 72,08%

2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikator dari program ini adalah persentase peningkatan pencari kerja yang dilatih. Pada tahun 2021 realisasi capaian keuangan sebesar 62,68% dan realisasi capaian kinerja sebesar 79,44%. Program ini terdiri dari 2 (dua) dan 2 (dua) sub kegiatan.

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Indikator dari program penempatan tenaga kerja adalah persentase peningkatan jejaring informasi lowongan kerja pada perusahaan. Pada tahun 2021 realisasi capaian keuangan sebesar 64,30% mengalami penurunan daripada tahun 2020 sebesar 71,54% dikarenakan anggaran difocusing, akan tetapi untuk realisasi capaian kinerja sebesar 15,79% dari target 15% yang ditentukan pada Rencana Kerja Tahun 2021. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikator program hubungan dari program hubungan industrial adalah persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan Persentase perusahaan yang dimonitor. Pada tahun 2021 realisasi capaian keuangan sebesar 84,20% mengalami penurunan daripada tahun 2020 sebesar 95,0% dan ini dikarenakan dampak dilakukannya refocusing anggaran pelaksanaan kegiatan. Namun untuk realisasi kinerja sebesar 104,05% dari indikator Persentase Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan Persentase perusahaan yang dimonitor sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Selanjutnya pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

TABEL TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2018)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2019)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N- 2/2019)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1					URUSAN WAJIB									
1	14				KETENAGAKERJAAN									
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	100%	300%	100%	100%	100%	100%	500%	500%
						INDEKS PROFESIONALITAS ASN PERANGKAT DAERAH								
						PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG TERCAPAI								
						INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/ APARATUR TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN DINAS TENAGA KERJA								

2	07	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN YANG TERSUSUN	5 dokumen	15	4	4	100 %	4	23	4,60
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersedia	3 dokumen	9	2	2	100 %	2	13	4,33
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Dan Data Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian	1 dokumen	3	1	1	100 %	1	5	5,00
						Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan	1 dokumen	3	1	1	100 %	1	5	5,00
2	07	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN	26 bulan	78	26	26	100 %	26	130	5,00
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Waktu Pembiayaan Gaji Dan Tunjangan	14 bulan	42	14	14	100 %	14	70	5,00
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	36	12	12	100 %	12	60	5,00
2	07	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN YANG TERSUSUN	131 kegiatan	393	131	131	100 %	131	655	5,00
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	11 kegiatan	33	11	11	100 %	11	55	5,00
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Makanan Dan Minuman	6 kegiatan	18	6	6	100 %	6	30	5,00
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan	13 kegiatan	39	13	13	100 %	13	65	5,00
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Pengadaan Bahan / Material Alat Tulis Kantor	1 kegiatan	3	1	1	100 %	1	5	5,00

2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Pelaksanaan Pembiayaan Rapat-Rapat Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah	100 kegiatan	300	100	100	100 %	100	500	5,00
2	07	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24 bulan	72	24	24	100 %	24	120	5,00
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Pembiayaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	36	12	12	100 %	12	60	5,00
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pembiayaan Jasa Tenaga Kerja Non Asn	12 bulan	36	12	12	100 %	12	60	5,00
2	07	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37 dokumen	111	37	37	100 %	37	185	5,00
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dilakukan Pemeliharaan	6 kendaraan	18	6	6	100 %	6	30	5,00
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 kegiatan	3	1	1	100 %	1	5	5,00
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	30 unit	90	30	30	100 %	30	150	5,00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENINGKATAN PENCARI KERJA YANG DILATIH	70%	55%	60%	62%	103%	70%	187%	267%

2	07	03	2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	JUMLAH PENCAKER YANG DILATIH BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	132	232	212	212	100 %	144	588	4,45
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Ketenagakerjaan Sesuai Klaster Kompetensi	132 orang	232	212	212	100 %	144	588	4,45
2	07	03	2.02		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	JUMLAH LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (PENGELOLA) YANG DIBERIKAN PEMBINAAN	25 Lembaga	40	15	15	100 %	10	65	2,60
						JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI	10 perusahaan	10	10	10	100 %	10	30	3,00
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lpk Swasta Yang Dibina	25 Lembaga	40	15	15	100 %	10	65	2,60
						Jumlah Peserta Pembinaan Pemagangan Dalam Negeri	10 perusahaan	10	10	10	100 %	10	30	3,00
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENINGKATAN JEJARING INFORMASI LOWONGAN KERJA PADA PERUSAHAAN	15%	124,40%	14%	17%	121%	14%	155%	1036%
2	07	04	2.01		PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENCARI KERJA YANG DIBERIKAN FASILITASI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	20 orang	120	40	40	100 %	20	180	9,00
						JUMLAH DOKUMEN PENDUKUNG PELAYANAN ANTAR KERJA	1 dokumen	3	1	1	100 %	0	4	4,00
						JUMLAH KK TRANSMIGRAN DAN CALON LOKASI TRANS YANG LAYAK HUNI UNTUK KAB. MOJOKERTO	3 KK	14	5	3	60 %	3	20	6,67

2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Dokumen Pendukung Penyediaan Sumber Daya Pada Pelayanan Antar Kerja	1 dokumen	3	1	1	100 %	0	4	4,00
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Kk Transmigran Dan Calon Lokasi Trans Yang Layak Huni Untuk Kab. Mojokerto	3 KK	14	5	3	60 %	3	20	6,67
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencaker Yang Mendapatkan Fasilitas Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	120	40	40	100 %	20	180	9,00
2	07	04	2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	JUMLAH PESERTA PENYULUHAN / PENYEBARLUASAN BURSA TENAGA KERJA	300 orang	210	90	90	100 %	300	600	2,00
						JUMLAH STAND/ PERUSAHAAN PENYEDIA INFORMASI LOWONGAN KERJA	40 stand	40	30	30	100 %	30	100	2,50
2	07	04	2.03	03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Peserta Penyuluhan / Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	300 orang	210	90	90	100 %	300	600	2,00
						Jumlah Stand / Perusahaan Penyedia Informasi Lowongan Kerja	40 stand	40	30	30	100 %	30	100	2,50
2	07	04	2.05		PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ORANG YANG DIBERIKAN PEMBINAAN PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA	50 orang	150	60	60	100 %	0	210	4,20
2	07	04	2.05	01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Peserta Yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan Imta	50 orang	150	60	60	100 %	0	210	4,20

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN	82%	95%	80%	86%	108%	82%	263%	321%
						PERSENTASE PERUSAHAAN YANG DIMONITOR	75%	0	0	0	0	70%	0,7	93%
2	07	05	2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ORANG YANG DIBERIKAN FASILITASI PEMBINAAN PENCEGAHAN PERSELISIHAN HI	210 orang	390	265	265	100 %	0	655	3,12
						PERSENTASE KEIKUTSERTAAN RAPAT PEMBINAAN HI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	3,00
						JUMLAH PENANGANAN PERSELISIHAN HI	30 penanganan	80	30	30	100 %	14	124	4,13
						JUMLAH PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN FASILITASI PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA	200 perusahaan	470	115	115	100 %	95	680	3,40
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Diberikan Fasilitas Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hi	210 orang	390	265	265	100 %	0	655	3,12
						Jumlah Rapat Usulan Umk Serta Umk	7 rapat	21	7	7	100 %	4	32	4,57
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Perselisihan Hi	30 penanganan	80	30	30	100 %	14	124	4,13
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Pemberdayaan Lks Tripartit	4 rapat	8	2	2	100 %	0	10	2,50
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Peserta Yang Diberikan Fasilitas Pembinaan Perlindungan Tenaga Kerja	200 perusahaan	470	115	115	100 %	95	680	3,40

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dirumuskan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, antara lain:

- 1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja;
- 2. Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten;
- 3. Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
- 4. Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja dalam Jaminan Sosial.

Target dan realisasi pencapaian dari 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel TC-30.

TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PERSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA			82%	84%					
2	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG BERKUALITAS DAN KOMPETEN			85%	85%					
3	PERSENTASE TINGKAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN			6%	5%					
4	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM JAMINAN SOSIAL			5%	6%					

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bahwa isu-isu penting ketenagakerjaan yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja diantaranya sebagai berikut:

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
1	Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);	Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada di bawah target yang dicanangkan yaitu 3,45%, sementara pencapaian angka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,68%. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri dan wirausaha, sehingga sulit bersaing di pasar bebas baik di level lokal/ daerah dan luar Daerah serta kekurangsiapan menghadapi era industri 4.0	Bahwa perlunya Pelatihan yang berbasis ketrampilan dan sertifikasi dalam berbagai sektor usaha terhadap pencari kerja yang dengan bentuk uji kompetensi agar pencari kerja/ tenaga kerja tersebut mampu bersaing di level lokal/ daerah dan luar daerah khususnya kesiapan dalam menghadapi era industri 4.0. Selain itu meningkatkan penyuluhan bursa kerja serta informasi kerja ke dalam bentuk bursa kerja serta mengadakan pembinaan serta perluasan kesempatan kerja dengan berkoordinasi dengan para perusahaan agar dapat membuka sektor pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara optimal
2	Kurangnya Perlindungan dan fasilitas Kesejahteraan Tenaga Kerja di perusahaan	- Masih banyaknya perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten Mojokerto yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan yang baik dan benar termasuk penyediaan sarana dan prasarana keselamatan kerja K3 yang belum merata di perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto; - Minimnya angka Tenaga Kerja yang diikut sertakan ke dalam Program Jaminan Sosial (Cth. BPJS) Ketenagakerjaan sebagai fasilitas wajib dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja;	- Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi penerapan norma kerja, sosialisasi penerapan sarana dan prasarana keselamatan kerja (K3) di perusahaan dalam bentuk monitoring secara langsung dan berkala sebagai sarana hubungan industrial untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di wilayah Kabupaten Mojokerto; - Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi agar perusahaan diwilayah Kabupaten Mojokerto mengikutsertakan seluruh pekerjaanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk preventif secara langsung untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja di tempat kerjanya;
3	tingginya resiko Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto	Tinginya angka Perselisihan Hubungan Industrial antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja;	Bahwa dengan banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai

			contoh isu yang paling banyak terjadi adalah tingginya angka Upah Minimum Kerja, sehingga banyak perusahaan yang mencoba untuk bertahan atau survive dengan cara mengurangi jumlah karyawan maka pemutusan hubungan kerja massal atau penutupan perusahaan sebagai cara yang terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha agar dapat terus menjalankan perusahaannya tidak dapat terhindarkan lagi. Maka Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto dalam hal ini akan mengupayakan secara maksimal pendekatan secara sosialisasi maupun pembinaan hubungan industrial dalam bentuk klasikal atau ke perusahaan agar setiap perselisihan yang terjadi dapat terselesaikan di tingkat perusahaan secara bipartit
4	Kurangnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Perlunya pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap perlindungan dan fasilitasi tCalon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari proses dan tata cara pemberangkatan, selama bekerja dan setelah hubungan kerja berakhir (pemulangan)
5	Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Fasilitasi Transmigrasi	Fasilitasi transmigrasi masih belum dijadikan solusi peningkatan kesejahteraan bagi masy. Mojokerto	1. terbatasnya kuota calon transmigran; 2. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat terhadap fasilitasi transmigrasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review Rancangan RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan riil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada tabel TC-31.

TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	8	9	10	11	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
	KETENAGAKERJAAN					KETENAGAKERJAAN					
2.07.01						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Disnaker Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A)		
								Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi	5.250.896.600	
2.07.01.2.01						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	39.140.000	

2.07.01.2.01.01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	
						RINCIAN :					
						Dokumen Rencana Kerja APBD			1 Dokumen	3.750.000	
						Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 Dokumen	3.750.000	
2.07.01.2.01.07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	31.640.000	
						RINCIAN :					
						Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribunal			4 Dokumen	2.280.000	
						Penyusunan Dokumen LKjIP			1 Dokumen	2.250.000	
						Penyusunan Dokumen SAKIP			1 Dokumen	2.250.000	
						Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan			1 Laporan	24.860.000	
2.07.01.2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	4.781.156.600	
2.07.01.2.02.01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bln	4.781.156.600	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan Gaji ASN dan Tunjangan ASN			36 Orang/ bln	2.500.895.000	
						Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Orang/ bln	1.994.400.000	

						Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Orang/ bln	88.740.000	Komponen : Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN
						Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			3042 orang/ bln	197.121.600	39 OPD, 18 Kecamatan
2.07.01.2.02.02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 dokumen	-	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	
2.07.01.2.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	-	
2.07.01.2.02.02						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	-	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			1 Paket	-	
2.07.01.2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	125.600.000	

2.07.01.2.06.02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	35.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Paket	35.000.000	
2.07.01.2.06.04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	8.600.000	
						RINCIAN :					
						Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			5 Paket	8.600.000	
2.07.01.2.06.05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	20.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			13 Paket	20.000.000	
2.07.01.2.06.07						Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 Paket	30.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan bahan/ material ATK			1 Paket	30.000.000	
2.07.01.2.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	32.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 Laporan	32.000.000	

2.07.01.2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	196.000.000	
2.07.01.2.08.02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 Bln	6.218.806	
						Pembiayaan Jasa Air			12 Bln	-	Pakai Pompa Air Listrik
						Pembiayaan Jasa Listrik			12 Bln	63.781.194	
2.07.01.2.08.04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	126.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	126.000.000	Untuk 7 Org Non ASN
2.07.01.2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	109.000.000	
2.07.01.2.09.02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	44.000.000	

						RINCIAN :					
						Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 unit	40.350.000	
						Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 unit	3.650.000	
2.07.01.2.09.09						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			1 unit	50.000.000	
2.07.01.2.09.10						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 Unit	15.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			30 Unit	15.000.000	
2.07.02						Program Perencanaan Tenaga Kerja	Disnaker Kab. Mojokerto	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	75.000.000	
2.07.02.2.01						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 dokumen	75.000.000	
2.07.02.2.01.01						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	75.000.000	
						RINCIAN :					

						Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			1 Dokumen	75.000.000	
2.07.03						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	25%	1.252.000.000	
2.07.03.2.01						Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	176 Orang	1.142.000.000	
2.07.03.2.01.01						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 Orang	1.092.000.000	
						RINCIAN :					
						Pelatihan dan sertifikasi Komputer			32 orang	172.000.000	
						Pelatihan dan sertifikasi Tata Rias			16 Orang	90.000.000	
						Pelatihan Operator Alat Berat			16 Orang	95.000.000	
						Pelatihan dan sertifikasi Las			16 Orang	80.000.000	
						Pelatihan Tata Boga			16 Orang	80.000.000	
						Pelatihan dan sertifikasi Teknisi AC Residential			16 Orang	75.000.000	
						Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)					
						RINCIAN :					
						Pelatihan dan Sertifikasi Tata Rias Pengantin (DBHCHT)			16 Orang	200.000.000	
						Pelatihan dan Sertifikasi Menjahit (DBHCHT)			16 Orang	150.000.000	
						Pelatihan dan Sertifikasi Pembuatan Roti dan Kue (DBHCHT)			16 Orang	150.000.000	

2.07.03.2.01.02						Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	16 Lembaga	50.000.000	
						RINCIAN :					
						Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK			16 Lembaga	50.000.000	
2.07.03.2.02						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 Lembaga	60.000.000	
2.07.03.2.02.01						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 Lembaga	60.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 LPK	30.000.000	
						Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Perusahaan	30.000.000	
2.07.03.2.04						Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	4 Perusahaan	50.000.000	

2.07.03.2.04.01						Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	4 Perusahaan	50.000.000	
						RINCIAN :					
						Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			4 Perusahaan	50.000.000	
2.07.04						Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	365.000.000	
2.07.04.2.01						Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	140.000.000	
2.07.04.2.01.02						Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	3 Orang	90.000.000	
						RINCIAN :					
						Fasilitas Transmigrasi			3 Orang	90.000.000	
2.07.04.2.01.05						Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	10 Orang	50.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			10 Orang	50.000.000	

2.07.04.2.03						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	150.000.000	
2.07.04.2.03.03						Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	45 Orang	150.000.000	
						RINCIAN :					
						Job Fair		Jumlah Stand Perusahaan Peserta Job Fair	20 Stand	100.000.000	
						Penyuluhan Informasi Bursa Kerja		Jumlah Peserta Penyuluhan Informasi Bursa Kerja	50 Lembaga	50.000.000	
2.07.04.2.04						Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 Orang	25.000.000	
2.07.04.2.04.01						Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	25.000.000	
						RINCIAN :					
						Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			20 Orang	25.000.000	

2.07.04.2.05						Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	30 orang	50.000.000	
2.07.04.2.05.01						Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	30 orang	50.000.000	
						RINCIAN :					
						Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA			30 orang	50.000.000	
2.07.05						Program Hubungan Industrial	Kab. Mojokerto	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	485.000.000	
							Kab. Mojokerto	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%		
2.07.05.2.02						Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100%	485.000.000	

2.07.05.2.02.01						Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 Perkara	180.000.000	
						RINCIAN :					
						Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			60 Orang	30.000.000	
						Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			30 Orang	50.000.000	
						Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			40 Orang	50.000.000	
						Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Kegiatan	50.000.000	
2.07.05.2.02.02						Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	25.000.000	
						RINCIAN :					
						Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000	

2.07.05.2.02.04						Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	45.000.000	
						RINCIAN :					
						Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			1 Lembaga	45.000.000	
2.07.05.2.02.05						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	200 Orang	235.000.000	
						RINCIAN :					
						Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			40 Orang	65.000.000	
						Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			40 Orang	60.000.000	
						Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			50 Orang	80.000.000	
						Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan			30 Orang	30.000.000	
						JUMLAH				7.427.896.600	

2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bahwa kajian dalam penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berpedoman kepada Program-program Nasional dan prioritas kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Mojokerto, dimana dapat dilihat pada Tabel TC-32

TABEL TC-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2022 KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – 2026, maka diperoleh hasil telaah sebagai berikut:

- **Visi**

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong

- **Misi**

Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan

- **Tujuan**

Meningkatkan pedayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja serta sebagai upaya menurunkan pengangguran

- **Sasaran**

1. Meningkatnya kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
2. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial;
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang norma ketenagakerjaan;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas nasional tersebut maka disusun program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 antara lain:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program hubungan industrial

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, Dinas Tenaga Kerja Melaksanakan Misi Ke 2 “**Membangun Kemandirian Ekonomi**

Berdimensi Kerakyatan". Sementara Tujuannya adalah **"Penurunan Angka Pengangguran"** dan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- 1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;*
- 2. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan*

Berikut ini ditampilkan Tabel 3.2.1 sebagai pedoman sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

TABEL 3.2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Penurunan Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,75	5,62	5,42	5,09	4,76	4,43	4,10
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00 (B)	70,00 (B)	70,50 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	72,50 (BB)
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Serta Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten	85%	85%	85%	85%	87%	90%	90%
			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	82%	82%	82%	84%	84%	85%	86%
		Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif Serta Optimalisasi Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan		6%	6%	5%	5%	4%	4%
			Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja Dalam Jaminan Sosial		5%	5%	6%	6%	7%	8%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan. Dimana pada tahun 2023 mendatang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang Ketenagakerjaan.

Adapun program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel TC – 33.

TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
	KETENAGAKERJAAN								
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	84,40 (A)	5.250.896.600	APBD		84,40 (A)	5.556.834.100
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan		1 Inovasi				2 Inovasi	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100%	39.140.000			100%	43.054.000
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	7.500.000			2 Dokumen	8.250.000
	RINCIAN :								
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 Dokumen	3.750.000			1 Dokumen	4.125.000
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 Dokumen	3.750.000			1 Dokumen	4.125.000
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	31.640.000			4 Laporan	34.804.000
	RINCIAN :								

	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribunal			4 dokumen	2.280.000			4 dokumen	2.508.000
	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 dokumen	2.250.000			1 dokumen	2.475.000
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 dokumen	2.250.000			1 dokumen	2.475.000
	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan			1 Laporan	24.860.000			1 Laporan	27.346.000
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%	4.774.016.600			90%	5.032.266.100
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 orang/bln	4.781.156.600			36 orang/bln	5.040.120.100
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Orang/bln	2.500.895.000			36 Orang/bln	2.750.984.500
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Orang/bln	1.994.400.000			36 Orang/bln	1.994.400.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Orang/bln	88.740.000			36 Orang/bln	97.614.000
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			3042 Orang/bln	197.121.600			3042 Orang/bln	197.121.600
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		10 dokumen	-			10 dokumen	-
	RINCIAN :								
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			10 Dokumen	-			10 Dokumen	-
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		75%	-			75%	-
2.07.01.2.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1 Paket	-			1 Paket	-
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			1 Paket	-			1 Paket	-

2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%	125.600.000			100%	138.160.000
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		6 Paket	35.000.000			6 Paket	38.500.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Paket	35.000.000			6 Paket	38.500.000
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		5 Paket	8.600.000			5 Paket	9.460.000
	RINCIAN :								
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			5 Paket	8.600.000			5 Paket	9.460.000
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		13 Paket	20.000.000			13 Paket	22.000.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			13 Paket	20.000.000			13 Paket	22.000.000
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 Paket	30.000.000			1 Paket	33.000.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 Paket	30.000.000			1 Paket	33.000.000
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 Laporan	32.000.000			100 Laporan	35.200.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 Laporan	32.000.000			100 Laporan	35.200.000

2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100%	196.000.000			100%	215.600.000
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	70.000.000			12 Laporan	77.000.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 Bln	6.218.806			12 Bln	6.840.687
	Pembiayaan Jasa Air				-				-
	Pembiayaan Jasa Listrik			12 Bln	63.781.194			12 Bln	70.159.313
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan	126.000.000			12 Laporan	138.600.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	126.000.000			12 Laporan	138.600.000
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik		100%	109.000.000			100%	119.900.000
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit	44.000.000			6 Unit	48.400.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 unit	40.350.000			6 unit	44.385.000
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 unit	3.650.000			6 unit	4.015.000

2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	50.000.000			1 Unit	55.000.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			1 unit	50.000.000			1 unit	55.000.000
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		30 Unit	15.000.000			30 Unit	16.500.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			30 Unit	15.000.000			30 Unit	16.500.000
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja		100%	75.000.000			100%	82.500.000
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		1 dokumen	75.000.000			1 dokumen	82.500.000
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		1 Dokumen	75.000.000			1 Dokumen	82.500.000
	RINCIAN :								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			1 Dokumen	75.000.000			1 Dokumen	82.500.000
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kab. Mojokerto	25%	1.252.000.000	APBD		25%	1.337.200.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		128 Orang	1.142.000.000			128 Orang	1.256.200.000
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		112 Orang	1.092.000.000			112 Orang	651.200.000

	RINCIAN :								
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer			32 orang	172.000.000			32 orang	189.200.000
	Pelatihan dan sertifikasi Tata Rias			16 Orang	90.000.000			16 Orang	99.000.000
	Pelatihan Operator Alat Berat			16 Orang	95.000.000			16 Orang	104.500.000
	Pelatihan dan sertifikasi Las			16 Orang	80.000.000			16 Orang	88.000.000
	Pelatihan Tata Boga			16 Orang	80.000.000			16 Orang	88.000.000
	Pelatihan dan sertifikasi Teknisi AC Residential			16 Orang	75.000.000			16 Orang	82.500.000
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)								
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Rias Pengantin (DBHCHT)			16 Orang	200.000.000			16 Orang	220.000.000
	Pelatihan dan Sertifikasi Menjahit (DBHCHT)			16 Orang	150.000.000			16 Orang	165.000.000
	Pelatihan dan Sertifikasi Pembuatan Roti dan Kue (DBHCHT)			16 Orang	150.000.000			16 Orang	165.000.000
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		16 Lembaga	50.000.000			16 Lembaga	55.000.000
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK			16 Lembaga	50.000.000			16 Lembaga	55.000.000

2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		30 Lembaga	60.000.000			30 Lembaga	66.000.000
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		30 Lembaga	60.000.000			30 Lembaga	66.000.000
	RINCIAN :								
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 LPK	30.000.000			15 LPK	33.000.000
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Perusahaan	30.000.000			15 Perusahaan	33.000.000
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		4 Perusahaan	50.000.000			4 Perusahaan	55.000.000
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		4 Perusahaan	50.000.000			4 Perusahaan	55.000.000
	RINCIAN :								
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			4 Perusahaan	50.000.000			4 Perusahaan	55.000.000
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	Kab. Mojokerto	72%	365.000.000	APBD		72%	401.500.000
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitasi Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100%	140.000.000			100%	154.000.000
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		3 Orang	90.000.000			3 Orang	99.000.000
	RINCIAN :								
	Fasilitasi Transmigrasi			3 Orang	90.000.000			3 Orang	99.000.000

2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		10 Orang	50.000.000			10 Orang	55.000.000
	RINCIAN :								
	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			10 Orang	50.000.000			10 Orang	55.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100%	150.000.000			100%	165.000.000
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		45 Orang	150.000.000			45 Orang	165.000.000
	RINCIAN :								
	Job Fair	Jumlah Stand Perusahaan Peserta Job Fair		20 Stand	100.000.000			20 Stand	110.000.000
	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja	Jumlah Peserta Penyuluhan Informasi Bursa Kerja		50 Lembaga	50.000.000			50 Lembaga	55.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		20 Orang	25.000.000			20 Orang	27.500.000
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		20 Orang	25.000.000			20 Orang	27.500.000
	RINCIAN :								
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			20 Orang	25.000.000			20 Orang	27.500.000

2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA		30 orang	50.000.000			30 orang	55.000.000
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA		30 orang	50.000.000			30 orang	55.000.000
	RINCIAN :								
	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA			30 orang	50.000.000			30 orang	55.000.000
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Kab. Mojokerto	80%	485.000.000	APBD		80%	533.500.000
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial		56%				56%	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100%	485.000.000			100%	533.500.000
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah		4 Perkara	180.000.000			4 Perkara	198.000.000
	RINCIAN :								
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			60 Orang	30.000.000			60 Orang	33.000.000

	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			30 Orang	50.000.000			30 Orang	55.000.000
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			40 Orang	50.000.000			40 Orang	55.000.000
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Kegiatan	50.000.000			3 Kegiatan	55.000.000
									-
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		10 Perkara	25.000.000			10 Perkara	27.500.000
	RINCIAN :								
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000			10 Perkara	27.500.000
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga	45.000.000			1 Lembaga	49.500.000
	RINCIAN :								
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			1 Lembaga	45.000.000			1 Lembaga	49.500.000
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		160 Orang	235.000.000			160 Orang	258.500.000
	RINCIAN :								
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			40 Orang	65.000.000			40 Orang	71.500.000

	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			40 Orang	60.000.000			40 Orang	66.000.000
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			50 Orang	80.000.000			50 Orang	88.000.000
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan			30 Orang	30.000.000			30 Orang	33.000.000
	JUMLAH				7.427.896.600				7.951.534.100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Rekapitulasi Ranwal Renja tahun 2023 yang memuat usulan program dan kegiatan Tahun 2023 kemudian disinkronisasikan melalui RKPD dengan pagu indikatif sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR												
	KETENAGAKERJAAN												
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A)	Kab. Mojokerto	5.250.896.600					
				Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi							
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100%		39.140.000					
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		7.500.000					
	RINCIAN :												
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1 Dokumen		3.750.000					
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD					1 Dokumen		3.750.000					
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		31.640.000					
	RINCIAN :												

	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribunal				4 dokumen		2.280.000					
	Penyusunan Dokumen LKjIP				1 dokumen		2.250.000					
	Penyusunan Dokumen SAKIP				1 dokumen		2.250.000					
	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan				1 Laporan		24.860.000					
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%		4.781.156.600					
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bln		4.781.156.600					
	RINCIAN :											
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bln		2.500.895.000					
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)				36 Orang/bln		1.994.400.000					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN				36 Orang/bln		88.740.000					
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan				3042 Orang/bln		197.121.600					
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 dokumen		-					
	RINCIAN :											
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen		-					
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%		-					
2.07.01.2.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket		-					
	RINCIAN :											
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas				1 Paket		-					

2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%		125.600.000					
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		6 Paket		35.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6 Paket		35.000.000					
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		5 Paket		8.600.000					
	RINCIAN :												
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					5 Paket		8.600.000					
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		13 Paket		20.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan					13 Paket		20.000.000					
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 Paket		30.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan bahan/ material ATK					1 Paket		30.000.000					
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 Laporan		32.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas					100 Laporan		32.000.000					

2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100%		196.000.000					
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan		70.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Komunikasi					12 Bln		6.218.806					
	Pembiayaan Jasa Air							-					
	Pembiayaan Jasa Listrik					12 Bln		63.781.194					
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan		126.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)					12 Laporan		126.000.000					
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik		100%		109.000.000					
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit		44.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor					6 unit		40.350.000					
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor					6 unit		3.650.000					

2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor					1 unit		50.000.000					
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		30 Unit		15.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor					30 Unit		15.000.000					
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja			Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%		75.000.000					
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		1 dokumen		75.000.000					
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		1 Dokumen		75.000.000					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja					1 Dokumen		75.000.000					
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	25%	Kab. Mojokerto	1.252.000.000					
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		176 Orang		1.142.000.000					

2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 Orang		1.092.000.000					
	RINCIAN :											
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer				32 orang		172.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Tata Rias				16 Orang		90.000.000					
	Pelatihan Operator Alat Berat				16 Orang		95.000.000					
	Pelatihan dan setifikasi Las				16 Orang		80.000.000					
	Pelatihan Tata Boga				16 Orang		80.000.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Teknisi AC Residential				16 Orang		75.000.000					
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)											
	RINCIAN :											
	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Rias Pengantin (DBHCHT)				16 Orang		200.000.000					
	Pelatihan dan Sertifikasi Menjahit (DBHCHT)				16 Orang		150.000.000					
	Pelatihan dan Sertifikasi Pembuatan Roti dan Kue (DBHCHT)				16 Orang		150.000.000					
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	16 Lembaga		50.000.000					
	RINCIAN :											
	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK				16 Lembaga		50.000.000					

2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		30 Lembaga		60.000.000					
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		30 Lembaga		60.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					15 LPK		30.000.000					
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri					15 Perusahaan		30.000.000					
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		4 Perusahaan		50.000.000					
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		4 Perusahaan		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil					4 Perusahaan		50.000.000					
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja			Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	Kab. Mojokerto	365.000.000					
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100%		140.000.000					
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		3 Orang		90.000.000					
	RINCIAN :												
	Fasilitasi Transmigrasi					3 Orang		90.000.000					

2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		10 Orang		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)					10 Orang		50.000.000					
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100%		150.000.000					
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja			Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		45 Orang		150.000.000					
	RINCIAN :												
	Job Fair			Jumlah Stand Perusahaan Peserta Job Fair		20 Stand		100.000.000					
	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja			Jumlah Peserta Penyuluhan Informasi Bursa Kerja		50 Lembaga		50.000.000					
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		20 Orang		25.000.000					
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		20 Orang		25.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)					20 Orang		25.000.000					

2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitas, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA		30 orang		50.000.000					
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA		30 orang		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA					30 orang		50.000.000					
2.07.05	Program Hubungan Industrial			Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	Kab. Mojokerto	485.000.000					
				Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%							
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100%		485.000.000					
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Perselisihan yang dicegah		4 Perkara		180.000.000					
	RINCIAN :												
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto					60 Orang		30.000.000					

	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing					30 Orang		50.000.000					
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial					40 Orang		50.000.000					
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan					3 Kegiatan		50.000.000					
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		10 Perkara		25.000.000					
	RINCIAN :												
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial					10 Perkara		25.000.000					
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga		45.000.000					
	RINCIAN :												
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit					1 Lembaga		45.000.000					
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		160 Orang		235.000.000					
	RINCIAN :												
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak					40 Orang		65.000.000					

	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja					40 Orang		60.000.000					
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan					50 Orang		80.000.000					
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan					30 Orang		30.000.000					
	JUMLAH							7.427.896.600					

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2023 yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

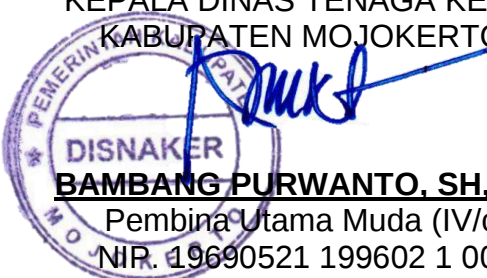
Bahwa Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 telah disesuaikan dengan kondisi Renstra 2021-2026 karena Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, Mei 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,


BAMBANG PURWANTO, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIR. 19690521 199602 1 001